

LKJIP KECAMATAN GARUM TAHUN 2024



**KECAMATAN GARUM
KABUPATEN BLITAR**

KATA PENGANTAR

Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dapat menyelesaikan “LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH”(LKJIP) Tahun 2024 dengan materi pokok laporan yang berisikan informasi kinerja.

Menyadari betapa pentingnya LKJIP bagi suatu unit kerja yang merupakan suatu keharusan bahwa masalah ini perlu ditangani secara serius dan professional, berdasarkan LKJIP inilah suatu pekerjaan dapat dilihat dan dihitung tingkat keberhasilannya, sehingga kegiatan yang belum berhasil perlu penanganan yang lebih intensif, sedangkan yang sudah berhasil dipertahankan sekaligus ditingkatkan.


Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Saran dan pendapat serta kritik yang membangun dari pengguna LKJIP ini untuk penyempurnaan dan perbaikan laporan tahun berikutnya akan kami terima dengan senang hati.

Akhirnya apa yang dapat tersaji ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.

Garum, Maret 2024

CAMAT GARUM
KABUPATEN BLITAR
CAMAT GARUM



ARINAL HUDA, S.Pd., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700501-199302 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3-4
1.4 Gambaran Umum	5-6
1.5 Struktur Organisasi	7-11
1.6 Dukungan Sumber Daya Manusia.....	12-14
1.7 Sistematika.....	15
Bab II Perencanaan Kinerja	16
2.1 Rencana Stratejik	16
2.2 Visi.....	17
2.3 Misi.....	17
2.4 Perjanjian kinerja	18
2.5 Program dan kegiatan	19-22
Bab III Akuntabilitas Kinerja	26
3.1 Capaian kinerja Organisasi.....	26
3.2 Analisis Akuntabilitas kinerja.....	32
3.3 Analisis Capaian Kinerja	33-43
3.4 Realisasi Anggaran.....	43-46
Bab IV Penutup	47
4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran.....	48
4.3 Rencana tindak lanjut.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peranyang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonomi

karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus memperhitungkan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Garum Tahun 2021 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) ;
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 23 Nopember 2011 Nomor 11 tahun 2011 perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 serta Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2012;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar);
5. Peraturan Bupati Blitar No 54 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Garum Tahun 2024 adalah memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Garum yang dilaksanakan satu tahun sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Blitar maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Garum tahun 2024 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun yang telah dilaksanakan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Blitar khususnya Kecamatan Garum
3. Dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;

4. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
5. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya dan sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

1.4 Gambaran Umum Kecamatan

Kecamatan Garum merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Blitar yang secara administrasi terdiri dari 9 Desa/Kelurahan (4 Kelurahan dan 5 Desa) dengan daerah perbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Karangrejo
- Sebelah Selatan : Kelurahan Garum
- Sebelah Barat : Desa Pojok
- Sebelah Timur : Kelurahan Bence

Gambar 1.2-1



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 71 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, susunan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar terdiri atas :

- Camat;
- Sekretaris Kecamatan;
- Seksi Pemerintahan;
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- Seksi Pelayanan Publik;
- Seksi Kesejahteraan Sosial;
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Program dan Keuangan;
- Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor Nomor 71 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Garum mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengkoordinasikan pemerliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
7. melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan;

8. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati/Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di bawah ini :

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di bawah ini :

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sedangkan susunan struktur organisasi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar terdiri atas :

a. Camat; bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Tugas : melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

Fungsi : - pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan;
- pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;

- pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

b. Sekretaris Kecamatan; bertanggungjawab kepada camat

Tugas : membantu camat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan ketatausahaan, urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum dalam lingkungan kantor kecamatan

- Fungsi :
- penyusunan rencana kegiatan dan program kerja kecamatan;
 - Evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja;
 - Penyiapan bahan dan data untuk perumusan kebijakan dan operasional pembinaan yang dilakukan oleh camat;
 - Penyiapan bahan koordinasi camat;
 - Pengkoordinasian dan pemberian pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan kantor kecamatan;
 - Pengkoordinasian anggaran keuangan belanja langsung maupun tidak langsung kecamatan;
 - Pengelolaan ketatausahaan urusan kepegawaian , urusan keuangan, urusan umum dan rumah tangga kantor;
 - Pengumpulan, pengelolaan dan pemeliharaan data serta dokumentasi;
 - Pelayanan administrasi kepada warga masyarakat;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat.

dan dalam melaksanakan tugas sekretaris kecamatan dibantu oleh 2 orang Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Tugas : menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program dan perencanaan anggaran kecamatan, monitoring dan evaluasi hasil program serta mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan

- Fungsi
- Pengumpulan bahan dan penganalisaan data guna penyusunan rencana penyusunan rencana program dan penyusunan anggaran keuangan kecamatan;
 - Penyiapan bahan pengkoordinasian anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
 - Penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan kuangan serta pengujian pembayaran;
 - Penyiapan bahan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor;
 - Penyiapan bahan penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan serta pelaporan keuangan;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan serta dokumen pendukung;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data

dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran;

- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil program kerja kecamatan;
- Penghimpunan dan penganalisaan data guna penyajian informasi tentang kecamatan;
- Penganalisaan hasil pelaksanaan program kecamatan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan hasil program kerja kecamatan;
- Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas : melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga, memelihara barang-barang inventaris serta administrasi kepegawaian

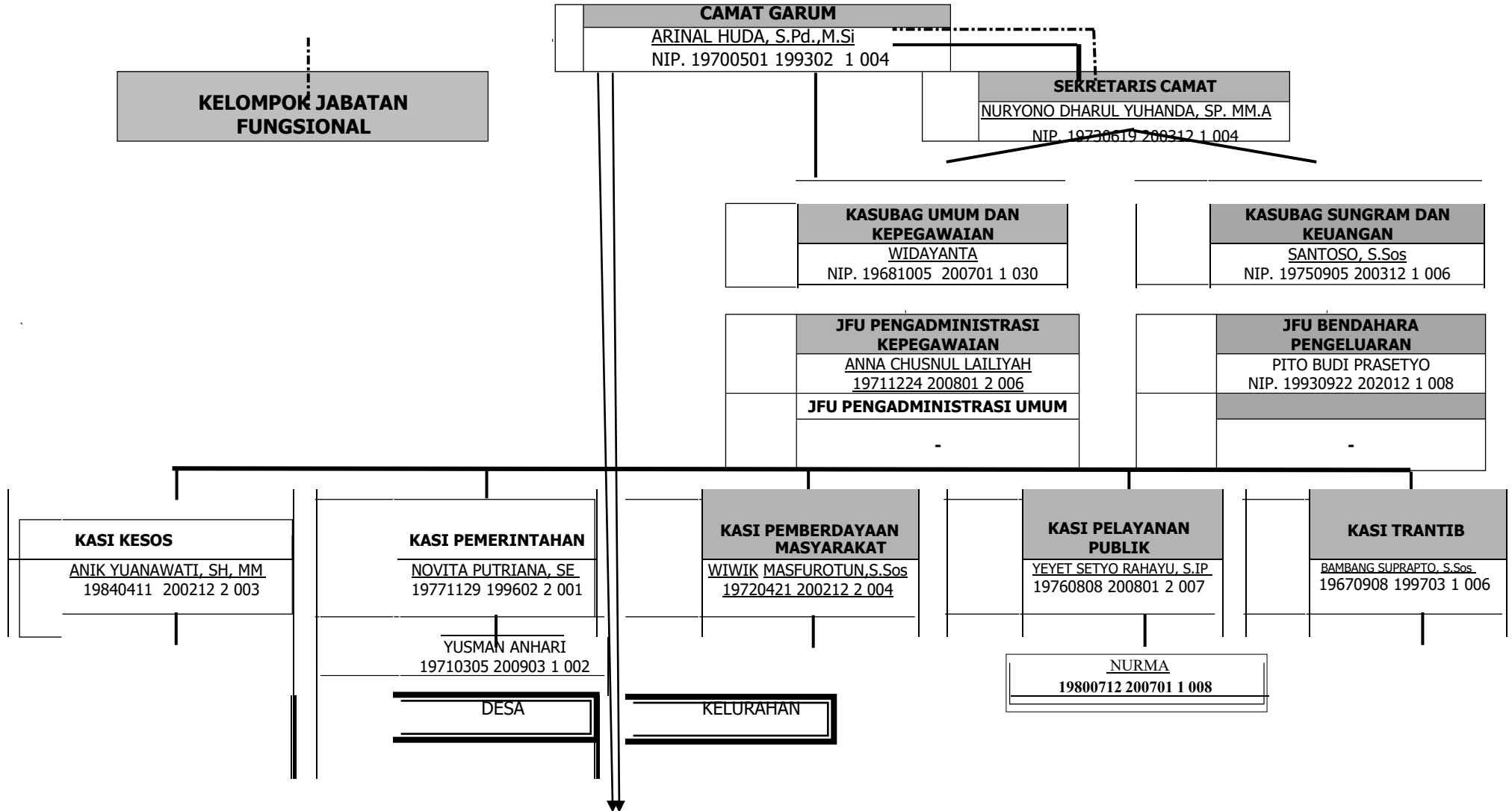
- Fungsi :
- penyelenggaraan dan pengkoordinasian urusan administrasi kepegawaian di kecamatan dan kelurahan dalam wilayahnya;
 - Penyelenggaraan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan;
 - Penyelenggaraan urusan ketatausahaan surat menyurat dan kearsipan;
 - Penyusunan rencana kebutuhan barang termasuk inventaris barang pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas;
 - Pelaksanaan penertiban, pengamanan dan

pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya;

- Penyusunan laporan tahunan tentang barang inventaris kantor;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GARUM

TAHUN 2024



- Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Blitar berlandaskan pada
1. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar : Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 2. Peraturan Bupati Blitar No 54 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Tugas Kecamatan adalah :

1. Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan sangat erat hubungannya dengan Isu isu strategis satuan kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Garum untuk permasalahan yang penting termasuk sarana dan prasarana, diperlukan rencana strategi yang merupakan proses utama dalam menyusun strategi operasional. Penyelenggaraan pemerintahan selalu di tekankan untuk Peningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam peningkatan pelayanan agar sesuai dengan harapan antara Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dengan Pemerintah Kabupaten Blitar

Harapan Kantor Kecamatan Garum yang sesuai dengan indikator kinerja adalah :

- Terwujudnya penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran yang baik dengan indikator kinerja tersedianya kegiatan administrasi perkantoran sehingga dapat mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.
- Terpenuhinya Sarana dan Prasarana penunjang indikator tersedianya perlengkapan kantor, pemeliharaan gedung dan kendaraan dinas.
- Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan indikator kinerja terlaksananya kegiatan pembangunan di masyarakat desa.

1.6 Dukungan Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar memiliki pegawai sebanyak 11 orang. Sumber daya manusia di lingkungan Kecamatan Garum lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Sumber Daya Manusia/Aparatur pada Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Tahun 2024 (Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Eselon)

No	Jenis Eselon	Jumlah
1	Eselon III a	1 Orang
2	Eselon III b	2 Orang
3	Eselon IV a	2 Orang
4	Eselon IV b	1 Orang
	Jumlah Keseluruhan	6 Orang

Tabel 1.2

Sumber Daya Manusia /Aparatur pada Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Tahun 2024 (Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Pendidikan)

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	S2	9 Orang
2	S1	16 Orang
3	SMA/SEDERAJAT	4 Orang
4	D3	4 Orang
	Jumlah Keseluruhan	33 Orang

Tabel 1.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Penempatan Pegawai

No	Lokasi Penempatan	Jumlah
1	Kecamatan Garum	14 Orang
2	Kelurahan Garum	6 Orang
3	Kelurahan Sumberdiren	6 Orang
4	Kelurahan Bence	3 Orang
5	Kelurahan Tawang Sari	5 Orang
	Jumlah Keseluruhan	33 Orang

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, sebanyak 33 orang memiliki pendidikan S2 sebanyak 9 orang (15%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 16 orang (45%), yang memiliki pendidikan SLTA, sebanyak 4 orang (25%), berdasarkan penempatan pegawai di Kecamatan Garum hanya 14 orang pegawai Sehingga dirasa sangat kurang sehingga mempengaruhi kinerja pegawai karena banyak pegawai yang overlod/kelebihan beban pekerjaan.

1.7 Sistematika

Sistematika penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Garum Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Gambaran Umum
- 1.5 Struktur Organisasi
- 1.6 Dukungan Sumber Daya Manusia
- 1.7 Sistematika

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategik
- 2.2 Visi
- 2.3 Misi
- 2.4 Perjanjian kinerja
- 2.5 Program dan kegiatan

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 1.1 Capaian kinerja Organisasi
- 1.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja
- 1.3 Analisis Capaian Kinerja
- 1.4 Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. MATRIK RENSTRA

B. PERJANJIAN KINERJA

C. RINGKASAN PENGUKURAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Kantor Kecamatan Garum agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, Nasional dan global dan tetap dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, Kantor Kecamatan Garum lebih dapat menyelaraskan Visi dan Misinya Kabupaten Blitar dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Pada prinsipnya Perencanaan stratejik Kantor Kecamatan Garum seharusnya mempunyai tolok ukur untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi memaksimalkannya pelayanan baik internal maupun secara eksternal kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan stratejik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan puncak untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Pengembangan stratejik dan implementasi yang efektif adalah penting untuk kelangsungan hidup organisasi. Pimpinan organisasi harus memastikan bahwa strategi yang dilakukan sesuai untuk organisasinya dan sesuai dengan waktunya.

2.2 VISI

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktumulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karenanya, visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi. Visi yang sangat tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut termasuk perancangan rencana strategis secara keseluruhan, pengeloaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran dan evaluasi kinerja yang akan diintegrasikan oleh instansi tersebut.

Dengan demikian visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif sehingga memiliki gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Blitar yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Garum menetapkan visinya sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan sejahtera berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun Thoyyibatun, Warobbunghofur)”. Kecamatan Garum ini diangkat dari fenomena otonomi daerah yang berbasiskan pada keunggulan kompetitif local, namun memiliki peluang dan tantangan yang bereskalasi global. Sebagaimana diketahui, sejak otonomi daerah diterapkan di Indonesia.

Bertolak dari pernyataan visi yang ingin dicapai oleh Kantor Kecamatan Garum serta mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terwujudnya pemerintahan yang baik dan terpercaya, maka dalam mengemban visisangat diperlukan adanya konsistensi perencanaan pembangunan yang strategis serta komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar untuk meningkatkan peran strategis Kantor Kecamatan Garum dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah.

2.3. Misi

Visi dan misi akan mendorong alokasi sumberdaya diseluruh unsur organisasi sehingga kedua ungkapan visi dan misi tersebut harus selaras dengan tugas yang diembannya. Apabila kita pahami dengan seksama sehingga pernyataan misi akan membawa organisasi kepada suatu focus yang menjelaari Visi Kepala Daerah terpilih, maka kita bisa menarik suatu garis besar bahwa dari visi dikaitkan dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Garum yang merupakan kepanjangan tangan Kepala Daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka Kecamatan Garum merupakan ujung tombak keberhasilan dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih tersebut, dengan:

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan kearifan Lokal Budaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan Komputer tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.
3. Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akutanbel, inovatif dan berintegritas.
4. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Dengan adanya misi maka akan diketahui apa yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dengan baik. Misi diharapkan juga akan dapat menunjukkan peran dan program-program instansi pemerintah kepada seluruh jajaran organisasi serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan mengacu kepada Misi yang telah ditetapkan maka dalam bentuk langkah-langkah strategis secara rinci dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa
2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2.4. Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparan,akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Perjajian kinerja juga diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja dengan digambarkan sebagai berikut :

NO <i>(1)</i>	Sasaran Strategis <i>(2)</i>	Indikator Kinerja <i>(3)</i>	Target <i>(4)</i>
1.	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	8%
2.	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Presentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Perekonomian Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang ditindaklanjuti dalam satu Tahun	100 %
		Presentase Peningkatan Desa /Kelurahan,dengan Administrasi berkualitas baik	100%

2.5 Program dan Kegiatan

Dua Sasaran Strategis tersebut merupakan arahan bagi Kantor Kecamatan Garum untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

A. Program Perencanaan,Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program Perencanaan. Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian Kinerja dan Keuangan.dibuat untuk mencapai sasaran setrategis meningkatnya Pelayanan Kecamatan dan Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan indikator kinerja Prosentase Perencanaan. Penganggaran,dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.tepat waktu. Kegiatan yang akan dilaksanakan tersusunnya dokumen laporan keuangan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Review dan Penyusunan Dokumen Renstra dengan indikator Kinerja Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan
 - b. Penyusunan RKA, DPA /DPPA dengan Indikator Kinerja Tersusunnya Renja, Renja Perubahan, RKA,RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan
 - c. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan Indikator Kinerja Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja SKPD
- B. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Program Administrasi Perangkat Daerah merupakan program untuk mencapai indikator kinerja terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD.
 - C. Program Kepegawaian Perangkat Daerah, Program Administrasi Perangkat Daerah merupakan program untuk mencapai indikator kinerja jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang – undangan.
 - D. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Program Administrasi Umum Perangkat Daerah merupakan capaian Indikator Kinerja tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah SKPD.
 - E. Program Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang merupakan capaian Indikator Penjumlahan jenis pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - F. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian indikator jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, tersedianya surat menyurat, jasa komunikasi sumber air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan jasa pelayanan umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :
 - a. Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan indikator kinerja Terlaksananya Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah
 - b. Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa/Kel dengan indikator kinerja terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pemerintahan Desa/Kel

- c. Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa /Kelurahan dengan indikator kinerja Terlaksananya Bimtek Peningkatan Pelayanan Prima Di Kecamatan Kelurahan dan Desa
 - d. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan, dan Fasilitas Musrenbang Desa /Kelurahan dengan indikator kinerja Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan, dan Fasilitas, Monev Musrenbang Desa / Kelurahan
 - e. Fasilitas Monitoring dan Evaluasi ,LPMK, Karangtaruna ,PKK, Muspika Perwosi, Posyandu, Karangwerda Kelurahan dengan indikator kinerja Terlaksananya Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi LPMK, Karangtaruna , Perwosi. Posyandu Karangwerda Kelurahan
 - f. Fasilitas Monitoring dan Evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan dengan indikator Terlaksananya Fasilitas Monitoring dan Evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan
 - g. Pembinaan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator kinerja Terwujudnya Nilai Budaya Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat
 - h. Sosialisasi dan Pembinaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan indikator kinerja Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
- G. Program Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Program ini merupakan capaian kinerja jumlah sarana dan prasarana yang dibangun dan Jumlah Pemberdayaan yang di laksanakan di Kelurahan

ALOKASI DANA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rata – rata Tingkat Capaian Kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan Daerah	5.535.492.485,-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penjumlahan dokumen perencanaan (Dokumen Renstra, Renja/Renja P ,RKA/RKAP, DPA/DPPA)	1.885.560,-
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan,keuangan bulanan,triwulan,s emest eran dan ahir tahun SKPD	3.580.000,-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi LKJIP, LPPD, Laporan Fungsional,Evaluasi Renja, CALK	3.240.000,-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi keuangan Perangkat daerah yang tepat waktu	3.347.443.000,-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah peserta teknis bimbingan Implementasi peraturan perundang undangan	134.500.000,-

2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	400.672.055,-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	548.959.325,-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	164.093.000,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu pemeliharaan Biaya Pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	340.979.020,-
	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan di Tingkat Kecamatan	11.405.000,-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Tersedianya kebutuhan Pelayanan Masyarakat	11.405.000,-
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.123.147.000,-
3	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	12.530.000,-

4		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Permberdayaan Kelurahan	11.375.000,-
		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah sarana yang dibangun	2.499.125.000,
		Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pemberdayaan yang di laksanakan	600.117.000,-
5	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Program koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	50.094.000,-
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	50.094.000,-
		Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	terlaksananya Pembinaan dan Monev Kantrantribmas dan Penegakan Peraturan Perundangan	50.094.000,-
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	43.305.000,-
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat beragama Ras, dan Golongan lainnya Guna mewujudkan	Terlaksananya koordinasi, yang dilaksanakan	43.305.000,-

stabilitas keamanan lokal regional dan nasional		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	106.760.350,-
Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	106.760.350,-
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	106.760.350,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang di mulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, output dan outcome. Serta menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Dalam Capaian Kinerja Organisasi berisikan realisasi anggaran yang mampu diserap setiap SKPD. Realisasi anggaran tersebut bertujuan untuk mencapai perencanaan yang sebelumnya telah ditetapkan. Dengan adanya capaian kinerja organisasi ini, setiap SKPD diharapkan mampu mengevaluasi serta dapat melihat seberapa besar persentase yang telah dicapai untuk meraih target kinerja yang telah direncanakan.

Capaian Kinerja Organisasi yang maksimal tentunya didapatkan tidak hanya dari perolehan persentase yang tinggi atau jumlah dana yang diserap secara maksimal tetapi yang terpenting adalah target yang telah direncanakan sebelumnya yakni mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dan tentunya bermanfaat bagi ekonomi yang berada di wilayah SKPD tersebut.

Kecamatan merupakan SKPD yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat secara langsung sehingga diharapkan capaian kinerja organisasi ini mampu mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat secara menyeluruh khususnya kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Garum yang meliputi empat kelurahan yakni Kelurahan Sumberdiren, Bence, Tawangsari dan Garum serta lima Desa yakni Desa Slorok, Tingal, Pojok, Sidodadi dan Karangrejo.

Pada tahun 2024 Kantor Kecamatan Garum mempunyai Enam Program kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan. Hasil capaian kinerja masing - masing sasaran akan diuraikan dalam tabel berikut ini :

**CAPAIAN REALISASI KINERJA KECAMATAN GARUM
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Kecamatan	96.10 %	96 %
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penjumlahan Dokumen perencanaan (dokumen renstra,renja/renja P, RKA/RKAP,DPA/DPPA)	1 Kecamatan	93,90 %	94 %
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dievaluasi perangkat daerah	1 Kecamatan	100 %	100 %
		Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	1 Kecamatan	100 %	100 %
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan, Triwulan,	1 Kecamatan	100 %	100 %
2						

3		Semesterandan Akhir Tahun SKPD				
	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah	1 Kecamat an	100 %	100 %	
	Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur	1 Kecamat an	100 %	100 %	
4		Program Perencanaan. Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Program Perencanaan. Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	1 Kecamat an	100 %	100 %
5	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Tersedianya Dokumen Renja/Renja P, Renstra, Perkin/Perkin P, LKJIP	14 Dokume n	100 %	100 %
		Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan	Tersedianya Dokumen RKA/RKAP, DPA / DPAP dan laporan Keuangan	21 Dokume n	100 %	100 %
		Program Fasilitasi	Prosentase Partisipasi	1 Tahun	99,92 %	99 %

dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa /Kelurahan	Masyarakat dalam Pembangunan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	9 Desa/ Kel	100 %	100 %
	Fasilitasi dan Kordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah	Terlaksananya Musrembang di Tingkat Kecamatan	1 Kali	100%	100%
	Fasilitasi Pembinaan dan Monev Kantratribmas dan Penegakan Peraturan Perundangan	terlaksananya Pembinaan dan Monev Kantratribmas dan Penegakan Peraturan Perundangan	12 Kali	100%	100%
	Fasilitasi Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan	Terlaksananya Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi LPMK, Karangtaruna , Perwosi. Posyandu Karangwerda Kelurahan	30 Kali	100%	100%

		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bence (Dau Tambahan)	Terbangunnya Saprasi dan Pelayanan Umum di Kelurahan Bence	6 Lokasi	100 %	100 %
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tawang Sari (Dau Tambahan)	Terbangunnya Saprasi dan Pelayanan Umum di Kelurahan Tawang Sari	4 Lokasi	100 %	100 %
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Garum (Dau Tambahan)	Terbangunnya Saprasi dan Pelayanan Umum di Kelurahan Garum	5 Lokasi	100 %	100 %
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumberdiren (Dau Tambahan)	Terbangunnya Saprasi dan Pelayanan Umum di Kelurahan Sumberdiren	7 Lokasi	100 %	100 %
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bence (APBD)	Bertambahnya Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bence	1 Lokasi	100 %	100 %
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Bertambahnya Sarana dan Prasarana di Kelurahan	2 Lokasi	100 %	100 %

		Tawangsari (APBD)	Tawangsari			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Garum (APBD)	Bertambahnya Sarana dan Prasarana di Kelurahan Garum	2 Lokasi	100 %	100 %
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumberdiren (APBD)	Bertambahnya Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sumberdiren	1 Lokasi	100 %	100 %
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bence (APBD)	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Kegiatan	90 %	90 %
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tawangsari (APBD)	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Kegiatan	97 %	97 %
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Garum (APBD)	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Kegiatan	90 %	90 %
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumberdiren	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	5 Kegiatan	90 %	90 %

		(APBD)	Kelurahan			
		Program Pelayanan Kecamatan	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	16 kali	90 %	90 %
		Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Fasilitasi	Prosentase jumlah obyek monev dan pembinaan pelayanan publik Terwujudnya	9 Desa/Kel	100%	100%
		Penerbitan Layanan Perijinan	Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan	50 Ijin	80%	80%

3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sarana prasarana dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Kantor Kecamatan Garum dapat meningkat.

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran strategis 1 : “Meningkatnya kualitas dan jangkauan Pelayanan publik sampai ke desa” Sasaran tersebut diatas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yang berkaitan dengan 3 (tiga) program.

Indikator pertama : Persentase pemenuhan Kebutuhan Administrasi perkantoran ditargetkan 100 % dan dapat direalisasikan 94,67 %.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran strategis	Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas dan jangkauan Pelayanan publik sampai ke desa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	94.67 %	95 %

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran : baru mencapai 95 % jumlah tersebut merupakan perhitungan dari kebutuhan belanja kantor untuk pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran. Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini adalah kurangnya dana yang tersedia, sehingga pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran belum semua tercukupi.

Indikator kedua : yaitu : Persentase Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang tersedia ditargetkan 100% dan dapat direalisasi 90 % dari hasil tersebut pemenuhan kebutuhan fasilitasi sarana prasarana kantor tidak bisa dicukupi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran strategis	Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik ke desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang tersedia	100 %	90 %	90%

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran : baru mencapai 90 % jumlah tersebut merupakan perhitungan dari kebutuhan belanja kantor untuk pemenuhan kebutuhan fasilitasi sarana prasarana kantor. Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini adalah Masih dalam pandemi maka kegiatan rutin yang ada dikelurahan tidak menyerap .

Indikator ketiga

yaitu : Prosentase Perencanaan. Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.tepat waktu ditargetkan 100% dandapat direalisasi 96,10 % dari hasil tersebut peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu bisa dicukupi sesuai kebutuhan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran strategis	Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke Desa	Perencanaan. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	96.10%	96 %

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran : bisa mencapai 95.80%. jumlah tersebut merupakan perhitungan dari kebutuhan belanja untuk peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu.

Sasaran strategis 2 : “Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa”

Indikator pertama : Presentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, Presentase Peningkatan Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang berkualitas baik ditargetkan 100 % dan dapat direalisasikan 90 % sebagian besar kebutuhan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa hampir tercukupi.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran strategis	Program dan kegiatan	Indikator kinerja	Targ et	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang ditindaklanjuti	Program Fasilitasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	Presentase Peningkatan Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang berkualitas	1 Tahun	90 %	90 %

No	Sasaran strategis	Program dan kegiatan	Indikator kinerja	Targ et	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Program Fasilitasi Pemerintahan Desa /Kelurahan	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 Tahun	99,92 %	99 %
		Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	9 Desa/ Kel	100 %	100 %
		Fasilitasi dan Kordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah	Terlaksananya Musrembang di Tingkat Kecamatan	1 Kali	100%	100%
		Fasilitasi Pembinaan dan Monev Kantrantribmas dan Penegakan Peraturan Perundangan	terlaksananya Pembinaan dan Monev Kantrantribmas dan Penegakan Peraturan Perundangan	12 Kali	100%	100%
		Fasilitasi Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya	Terlaksananya Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi LPMK, Karangtaruna ,	30 Kali	100%	100%

No	Sasaran strategis	Program dan kegiatan	Indikator kinerja	Targ et	Realisasi	Capaian %
		dan Keagamaan	Perwosi. Posyandu Karangwerda Kelurahan			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bence (Dau Tambahan)	Terbangunnya Sapras dan Pelayanan Umum di Kelurahan Bence	6 Lokasi	100 %	100 %
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tawangsari (Dau Tambahan)	Terbangunnya Sapras dan Pelayanan Umum di Kelurahan Tawangsari	4 Lokasi	100 %	100 %
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Garum (Dau Tambahan)	Terbangunnya Sapras dan Pelayanan Umum di Kelurahan Garum	5 Lokasi	100 %	100 %
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumberdiren (Dau	Terbangunnya Sapras dan Pelayanan Umum di Kelurahan Sumberdiren	7 Lokasi	100 %	100 %

No	Sasaran strategis	Program dan kegiatan	Indikator kinerja	Targ et	Realisasi	Capaian %
		Tambahan)				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bence (APBD)	Bertambahnya Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bence	1 Lokasi	100 %	100 %
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tawang Sari (APBD)	Bertambahnya Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tawang Sari	2 Lokasi	100 %	100 %
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Garum (APBD)	Bertambahnya Sarana dan Prasarana di Kelurahan Garum	2 Lokasi	100 %	100 %
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumberdiren (APBD)	Bertambahnya Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sumberdiren	1 Lokasi	100 %	100 %
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bence (APBD)	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Kegiatan	90 %	90 %

No	Sasaran strategis	Program dan kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tawang Sari (APBD)	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Kegiatan	97 %	97 %
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Garum (APBD)	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Kegiatan	90 %	90 %
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumberdiren (APBD)	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Kegiatan	90 %	90 %

Indikator kesatu Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan ditargetkan di 9 Desa dan Kelurahan dan telah dilaksanakan semua

Indikator kedua Terlaksananya Murenbang Tingkat Kecamatan dengan baik.dari Hasil Musrembang dari 3 sasaran strategis untuk pelaksanaan APBD Tahun 2021 terdapat 6 Rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Garum. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat di lihat pada tabel diatas.

Indikator ketiga Tidak terlaksananya Kegiatan PHBN dan Perayaan HUT Kemerdekaan dikarenakan adanya pandemi Covid 19 sehingga semua pelaksanaan Kegiatan yang melibatkan masyarakat ditiadakan, adapun perayaan tersebut hanya dilaksanakan secara virtual online saja.

No	Sasaran strategis	Program dan kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
----	-------------------	----------------------	-------------------	--------	-----------	-----------

Indikator keempat Terlaksananya Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi LPMK, Karangtaruna , Posyandu Karangwerda Kelurahan ditargetkan 18 kali dan dapat direalisasikan 2 kali karena adanya pandemi Covid 19 yang mengakibatkan kegiatan yang melibatkan masyarakat ditiadakan dan diganti dengan pelaksanaan secara virtual online saja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat tercapai namun belum maksimal

Indikator kelima Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana (DAU Tambahan) di Kelurahan Bence dapat dilaksanakan semuanya adapun capaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat di lihat pada tabel diatas.

Indikator keenam Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana (DAU Tambahan) di Kelurahan Tawangsari, dapat dilaksanakan semuanya adapun capaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat di lihat pada tabel diatas.

Indikator ketujuh Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana (DAU Tambahan) di Kelurahan Garum, dapat dilaksanakan semuanya adapun capaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat di lihat pada tabel diatas.

Indikator kedelapan Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana (DAU Tambahan) di Kelurahan Sumberdiren, dapat dilaksanakan semuanya adapun capaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat di lihat pada tabel diatas.

Indikator kesembilan Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana (APBD) di Kelurahan Bence yang dapat dilaksanakan seluruhnya. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat di lihat pada tabel diatas.

Indikator kesepuluh Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana (APBD) di Kelurahan Tawangsari yang dapat dilaksanakan seluruhnya. Pencapaian target

No	Sasaran strategis	Program dan kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
----	-------------------	----------------------	-------------------	--------	-----------	-----------

			indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat di lihat pada tabel diatas.			
			Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana (APBD) di Kelurahan Garum yang dapat dilaksanakan seluruhnya. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat di lihat pada tabel diatas.			
			Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana (APBD) di Kelurahan Sumberdiren yang dapat dilaksanakan seluruhnya. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat di lihat pada tabel diatas.			
			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bence (APBD) namun tidak maksimal karena adanya pandemi Covid 19 sehingga pelaksanaannya masih dihentikan			
			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tawang Sari (APBD) namun tidak maksimal karena adanya pandemi Covid 19 sehingga pelaksanaannya masih dihentikan			
			Tidak Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan (APBD) di Kelurahan Garum dikarenakan masih adanya Pandemi Covid 19.			
			Tidak Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan (APBD) di Kelurahan Sumberdiren dikarenakan masih adanya Pandemi Covid 19.			
			Terlaksananya Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dari target 9 Desa dan Kelurahan Pelaksanaan Perijinan bisa maksimal dilaksanakan			

No	Sasaran strategis	Program dan kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
----	-------------------	----------------------	-------------------	--------	-----------	-----------

Indikator Dua Terwujudnya Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan ditargetkan 50 Ijin dan dapat direalisasi 30 Ijin dari hasil tersebut Terwujudnya Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan dengan baik. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran strategis	Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah	Prosentase jumlah obyek monev dan pembinaan pelayanan publik	9 Desa/Kel	100%	100%
		Fasilitasi Penerbitan Layanan Perijinan	Terwujudnya Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan	50 Ijin	80%	80%

Dari uraian kegiatan diatas nampaknya sudah jelas namun masih banyak kegiatan yang belum bisa dimasukkan dalam program yang terdapat dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Garum.

3.4. Realisasi Anggaran

Secara umum Satuan Kerja Kecamatan Garum telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Garum Kabupaten Blitar tahun 2021 – 2026.

Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2024 pada Satuan Kerja Kecamatan Garum memiliki pencapaian kinerja sangat baik (94,16 %) dan

mencapai kinerja sesuai target sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini

:

Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan

No	Sasaran/Program	Indikator	Anggaran		
			Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	7	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	SAKIP	400.672.055,00	307.947.850,00	77 %
	Program 1. Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	400.672.055,00	307.947.850,00	77 %
	Program 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Penjumlahan jenis pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	164.093.000,00	159.738.100,00	97 %
	Program 3. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penjumlahan waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.959.325,00	526.725.741,00	96 %
	Program 4. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Penjumlahan Dokumen Perencanaan (Dokumen Renstra,Renja/RenjaP,RKA /RKAP,DPA/DPPA)	8.980.000,00	8.630.000,00	96 %
	Program 5 Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi perangkat daerah yang tepat waktu	3.351.023.000	3.188.149.946	95 %
	Program pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	340.979.020,00	297.864.900,00	87 %
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak	Jumlah Hasil Pelaksanaan IKM masing – masing desa	12.530.000,00	12.530.000,00	100 %

	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang akan di Kecamatan	dan kelurahan (presentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik)			
	Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prsarana Kelurahan.	Jumlah Sarpras yang dibangun,	2.499.125.000	2.498.185.530	99.91%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	600.117.000	446.591.342	74 %
	Sinegritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	50.094.000,00	49.670.000,00	99 %
	Program 6. Program PelayananKecamatan	Prosentasi Peningkatan Pelayanan Kecamatan	11.405.000,00	8.955.000,00	79 %
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan	43.305.000,00	26.955.000,00	62%
	Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembagunan daerah dengan pembangunan Desa	Jumlah Koordinasi dan kegiatan sinkronisasi perencanaan pembangunan	106.760.350,00	86.842.628,00	81 %
	Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan Pemberdayaan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	106.760.350,00	86.842.628,00	81 %

	Masyarakat Desa				
--	-----------------	--	--	--	--

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambar dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu kegiatan, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang ada pada Kantor Kecamatan Garum menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesainya keluaran ditahun berjalan misalnya Terlaksananya Evaluasi desa dan kelurahan karena hal ini menyangkut terhadap koordinasi yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.

Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan LKJIP, maka dibanding antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya kegiatan kegiatan lain yang baru dilaksanakan di Tahun 2024 yaitu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dau Tambahan), Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (APBD) dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (APBD). Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

4.2. Saran

Mengingat keadaan keuangan pemerintah yang masih kurang sehingga dana yang dialokasikan untuk kegiatan belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud. Masih adanya pagu anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan pagu anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Kecamatan Garum. Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan harus sesuai dengan RKA yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Akhirnya dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Garum yang telah dibuat bersama-sama ini dapat menjadi tolak ukur, bahan pertimbangan dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Garum, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu mewujudkan *“TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN THOYYIBATUN, WAROBBUNGHOFFUR)”*.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dimasa mendatang, perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di perdesaan berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan, seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Dalam arti bahwa kompleksitas permasalahan masyarakat semakin berkembang dan tingkat kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik akan semakin meningkat. Kantor Kecamatan Garum Kabupaten Blitar berperan aktif melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Blitar di bidang pelayanan publik kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan perihal diatas, maka rencana tindak lanjut (sebagai langkah proaktif) Kantor Kecamatan Garum Kabupaten Blitar yang dilaksanakan kedepan adalah :

1. Secara internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam mengedepankan pelayanan masyarakat.
2. secara kelembagaan, meningkatkan pengembangan penyediaan pelayanan public bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Garum agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Garum, Maret 2024

CAMAT GARUM



ARINAL HUDA, S.Pd., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700501 199302 1 004

1. Analisis Pencapaian Indikator Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI

2.

No	Variabel Penilaian	Ada/tdk	Keterangan
1.	Pelayanan Terpadu Satu Atap / Satu Pintu	ada	
2.	Standar Layanan		
	Dasar Hukum	ada	UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
	Persyaratan Layanan	ada	
	SOP Layanan	ada	Terdiri dari : 1. Pelayanan Rekomendasi Ijin Gangguan (HO) 2. Pelayanan Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 3. Pelayanan Penerbitan Kartu Susunan Keluarga (KSK) 4. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. Pelayanan Pindah Tempat 6. Pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
	Bagan Alur Layanan	ada	
	Produk Layanan	ada	
	Jangka Waktu Layanan	Tdk ada	
	Biaya / Tarif Layanan	Tdk ada	
3.	Sarana, Prasarana atau Fasilitas		
	Ruang Tunggu	ada	
	Pendingin Ruangan / AC di Unit Layanan	ada	
	Tempat Duduk	ada	
	Sarana Antrian	Tdk ada	
	Toilet	Tdk ada	

	Televisi	Tdk ada	
	Loket / Meja Pelayanan	ada	
	Tempat Parkir	ada	
	Profile petugas /Person In Charge/ Jumlah Pelaksana	ada	
	Tata tertib Layanan	Tdk ada	
	Kode Etik layanan	Tdk ada	
4.	Maklumat Pelayanan	Tdk ada	
5.	Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)	Tdk ada	
6.	Sarana Bagi Berkebutuhan Khusus		
	Ram	Tdk ada	
	Jalur Pemandu	Tdk ada	
	Pegangan Rambatan	Tdk ada	
	Toilet Khusus di Unit pelayanan	Tdk ada	
	Ruang Khusus ibu menyusui dan Anak	Tdk ada	
	Loket khusus	Tdk ada	
7.	Pengelolaan Pengaduan		
	Deks/Unit/Fungsi pengaduan	Tdk ada	
	Pejabat Pengelola Pengaduan	Tdk ada	
	Loket pengaduan / Ruang Pengaduan	Tdk ada	
	Sarana Pengaduan	Tdk ada	
	Prosedur / Tata cara pengaduan	Tdk ada	
	Informasi Hasil Pengelolaan Pengaduan	Tdk ada	
8.	Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan	Tdk ada	
9.	Visi dan Misi Pelayanan	Tdk ada	
10.	Moto Layanan	Tdk ada	
11.	ISO 9001-2008	Tdk ada	
12.	Atribut		
	Pakaian Seragam	Tdk ada	
	ID Card	Tdk ada	
	TOTAL NILAI		
	ZONA KEPATUHAN		

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :

Hasil indikator standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI masih terdapat banyak indikator variabel yang belum terpenuhi sehingga perlu adanya kepedulian semua pihak mulai dari pemerintah daerah kabupaten blitar sampai ke kecamatan untuk berkomitmen mewujudkannya.

❖ Solusi untuk Meningkatkan Penilaian Ombudsman adalah mencukupi semua indikator variabel di tahun 2024 antar lain :

▪ **Standart Pelayanan :**

- Jangka Waktu
- Biaya/Tarif Layanan

▪ **Sarana, Prasarana/Fasilitas**

- Sarana Antrian
- Toilet
- Televisi
- Tata Tertib Layanan
- Kode Etik Layanan

▪ **Maklumat Pelayanan**

▪ **Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)**

▪ **Sarana Bagi Berkebutuhan Khusus :**

- Ram
- Jalur Pemandu
- Pegangan Rambatan
- Toilet Khusus di Unit Pelayanan
- Ruang Khusus Ibu Menyusui dan Anak
- Loker Khusus

▪ **Pengolahan Pengaduan :**

- Deks/Unit/Fungsi pengaduan
- Pejabat Pengelola Pengaduan
- Loker pengaduan / Ruang pengaduan
- Sarana Pengaduan
- Prosedur / Tata cara pengaduan
- Informasi Hasil Pengelolaan pengaduan

- **Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan**
- **Visi dan Misi Pelayanan**
- **Moto Layanan**
- **ISO 9001-2008**
- **Atribut**
 - Pakaian Seragam
 - ID Card

Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Garum Kabupaten Blitar telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

- a. Juara Harapan II Lomba Gotong Royong (BBGRM) Tingkat Jawa Timur, Desa Sidodadi Kecamatan Garum.